

PENGEMBANGAN KESWADAYAAN KELOMPOK PEW SEBAGAI STRATEGI PEMBERDAYAAN EKONOMI BERBASIS KEWILAYAHAN DI KOTA YOGYAKARTA

Yuli Kurniyati (yulikurniyati@yahoo.co.id)

Fakultas Ekonomi, Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta

Bening Hadilinatih (linatih@yahoo.com)

FISIPOL, Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta

ABSTRACT. *Areas Based Economic Empowerment Program (Program Ekonomi Berbasis Kewilayahan/PEW) is a program designed to focus on the learning process and empower communities through local economic institutions to shore up the economy of the community itself. This study aims to: 1). Knowing the PEW Group self-reliance in organizing services to members in order to regionally based economic empowerment. 2). Identifying the factors management, member participation and partnership that hinder or support the PEW Group self-reliance and self-reliance opportunities for efforts to develop a support group for regionally based economic empowerment, 3). Formula and policy recommendations for the city authorities to develop and implement a model of self-reliance development PEW group as a regionally based economic empowerment strategy in the city of Yogyakarta. This research is qualitative research, the research took place in the town Yogyakarta. Teknik collecting data used were: study documentation, participant observation, in-depth interviews and focus group discussion (FGD). In the first study were: 1). Evaluating Performance PEW Group 2). Identify factors inhibiting and supporting self-sufficiency Group 3). Self-Supporting analyze PEW Group 4). Early formulation compile policy recommendations group. Penelitian development model of self-reliance. Year II study is 1). Self-Supporting Group to develop a model based on the results of Phase I study 2). Validation conduct joint FGD Stakeholder Model through 3). Develop Model Self-Supporting Implementation Handbook. Results showed that the level of self-reliance in the PEW group is still low. This is reflected in the level of independence that is still low, both in terms of independence in the administration, self-reliance and independence in the management of the assets. PEW group of self-sufficiency level is still low, due to several factors, namely: (1) Capacity Board PEW Group is still low (2) The lack of participation of members of the Group, and (3) lack of stakeholder support. Another factor that still requires serious treatment that can increase self-reliance PEW Group is a factor Assistance Group Implementation and Monitoring and Evaluation during implementation is still lacking*

Key words: *Self-Reliance group, economic empowerment, Area based*

I. PENDAHULUAN

Penguatan kapasitas lembaga ekonomi lokal melalui pemberdayaan masyarakat, adalah salah satu model peningkatan peran serta masyarakat dalam kegiatan yang dirancang dengan menitik beratkan pada proses pembelajaran dan memberdayakan masyarakat lewat lembaga ekonomi lokal untuk menopang perekonomian masyarakat itu sendiri. Pemerintah Kota Yogyakarta melalui Dinas Perindagkop mulai tahun 2006 telah memberikan penguatan permodalan kepada para pengusaha mikro dan kecil yang 80 tergabung dalam kelompok di 45 Kelurahan se-Kota Yogyakarta melalui kegiatan Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Kewilayahan (PEW) sebagaimana diamanatkan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 71 tahun 2009 tentang Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Kewilayahan Melalui Penguatan Modal Usaha Mikro dan Kecil yang disempurnakan dengan Perwal 106 tahun 2009. Pemberdayaan ekonomi berbasis kewilayahan melalui penguatan modal usaha mikro dan kecil yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pemerintah Kota Yogyakarta diharapkan dapat memperkuat usaha mikro dan kecil sehingga mampu tumbuh dan berkembang secara mandiri. Tidak dapat dipungkiri bahwa sampai saat ini kondisi usaha mikro dan kecil di Kota Yogyakarta masih lemah dalam berbagai aspek usaha diantaranya pada aspek permodalan baik dalam hal kemampuan penyediaan modal maupun dalam pengelolaannya. Sampai dengan tahun 2010 tercatat sebanyak 922 kelompok telah mendapatkan penguatan modal dalam bentuk bantuan dana bergulir melalui program PEW ini (Disperindagkop, 2012). Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Kewilayahan adalah kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan Usaha Mikro dan Kecil di Kelurahan dengan memberikan penguatan permodalan usaha, penguatan modal adalah kegiatan yang ditujukan untuk meningkatkan permodalan usaha mikro dan kecil melalui program bantuan dana bergulir yang dikelola oleh kelompok sebagai pinjaman lunak dana bergulir.

Permasalahan pokok dalam pemberdayaan masyarakat melalui ekonomi lokal adalah rendahnya tingkat keterampilan dan pengetahuan masyarakat, mengakibatkan rendahnya kemampuan masyarakat untuk memperoleh dan memanfaatkan akses sumberdaya yang tersedia. Hambatan lain yang signifikan berupa, rendah kemampuan lembaga dan organisasi ekonomi masyarakat dalam mengelola sumberdaya untuk meningkatkan kompetensinya. Potensi usaha mikro dan kecil di Kota

Yogyakarta cukup besar dan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian masyarakat, sehingga perlu untuk didorong dan dikembangkan agar menjadi pelaku ekonomi yang tangguh dan berdayas aing melalui program pemberdayaan ekonomi wilayah (PEW) ini. Untuk itulah maka kajian ini sangat perlu untuk dilakukan. Dengan memperhatikan masalah yang dihadapi oleh kelembagaan Kelompok PEW dalam pengembangan ekonomi lokal, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah tingkat keswadayaan Kelompok PEW dalam menyelenggarakan pelayanan kepada anggota dalam rangka pemberdayaan ekonomi berbasis kewilayahan?
2. Faktor-faktor apa sajakah yang dapat mendukung dan menghambat tingkat keswadayaan Kelompok PEW ?
3. Kebijakan apa yang perlu dibuat oleh Pemerintah agar tingkat keswadayaan Kelompok PEW dapat meningkat dan berkembang.?

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui keswadayaan Kelompok PEW dalam menyelenggarakan pelayanan kepada anggota dalam rangka pemberdayaan ekonomi berbasis kewilayahan, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat atau mendukung keswadayaan Kelompok PEW dan peluang bagi upaya mengembangkan keswadayaan kelompok untuk mendukung pemberdayaan ekonomi berbasis kewilayahan.

II. KAJIAN LITERATUR

1. Pengembangan Ekonomi Lokal

Menurut Syaukat dan Hendrakusumaatmaja (2004), Pengembangan Ekonomi Lokal (PEL) merupakan kerjasama seluruh komponen masyarakat di suatu daerah (lokal) untuk mencapai pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, yang akan meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan kualitas hidup seluruh masyarakat di dalam komunitas. PEL diperlukan karena selama ini daerah kabupaten/kota di Indonesia yang memiliki potensi sumber daya alam, manusia dan sosial budaya, belum termanfaatkan secara optimal dalam rangka pemerataan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Keberhasilan program PEL sangat ditentukan oleh motivasi pemerintah Pusat/Daerah dalam merencanakan, memformulasikan dan mengimplementasikan program-program Otonomi Daerah. Menurut Syaukat dan Hendrakusumaatmaja (2004), Pengembangan

ekonomi lokal memberi kesempatan kepada pemerintah lokal, swasta, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan masyarakat lokal untuk secara bersama-sama pro-aktif berusaha untuk memperbaiki dan mengembangkan lingkungan bisnisnya sehingga mereka mampu berkompetisi dengan daerah lainnya, bahkan internasional.

2. Pengembangan Keswadayaan Kelompok

Menurut Hubeis (1992), keswadayaan adalah perwujudan kemampuan seseorang untuk memanfaatkan potensi dirinya sendiri dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, yang dicirikan oleh kemampuan dan kebebasan menentukan pilihan yang terbaik. Sejalan dengan pendapat tersebut, Badan Pengembangan Swadaya Masyarakat (1986), memberikan batasan keswadayaan sebagai sikap yang bersumber pada kepercayaan diri dan juga kemampuan memahami kelemahan dan kekuatan diri sendiri, memperhitungkan kesempatan dan ancaman lingkungan, memilih berbagai alternatif yang tersedia untuk mengatasi persoalan dan mengembangkan kehidupan secara serasi dan berkesinambungan. Batasan-batasan sebagaimana dikemukakan memberikan acuan bahwa keswadayaan kelompok menunjuk pada kemampuan pengurus dan anggota untuk menentukan pilihan terbaik bagi pemecahan masalah dan pengembangan pelayanan keuangan yang berkelanjutan dengan menggunakan sumber-sumber yang tersedia, sehingga memiliki kemampuan memenuhi kebutuhan dan aspirasi anggota-anggotanya. Pengembangan keswadayaan adalah usaha yang terencana untuk memudahkan lahirnya organisasi swadaya dan memperkuat jalannya fungsi-fungsi organisasi (Verhagen, 1996). Ini berarti bahwa upaya mengembangkan keswadayaan kelompok berfokus pada perbaikan dan pengembangan fungsi-fungsi Kelompok, melalui aktivitas yang terencana dengan tujuan mewujudkan Kelompok yang swadaya.

Pengembangan keswadayaan kelompok usaha simpan pinjam tidak berarti mengesampingkan potensi dan sumberdaya dari luar lembaga. Kerjasama dan jejaring melalui kemitraan usaha dengan pihak luar merupakan faktor penting untuk mendukung efektifitas pengembangan keswadayaan. Perlunya kerjasama dalam pengembangan keswadayaan ini ditekankan oleh Cartwright dan Zander (1988), yang berpendapat bahwa kemandirian tidak berarti anti terhadap kerjasama atau menolak saling keterkaitan dan saling ketergantungan. Keswadayaan justru menekankan perlunya kerjasama yang disertai dengan tumbuhnya kemampuan untuk memecahkan masalah, menyalurkan aspirasi, berkeaktifitas, keberanian menghadapi resiko,

keuletan, sikap dan kemampuan berwira usaha, dan. Prakarsa untuk bertindak atas dasar kekuatan sendiri dalam kebersamaan (*collective selfreliance*). Untuk mengembangkan keswadayaan kelompok, Verhagen (1996), mengemukakan delapan instrumen pengembangan keswadayaan, antara lain : Identifikasi Penduduk dan Kelompok Sasaran, Pengkajian dan Perencanaan Partisipati, Pendidikan dan Pelatihan, Mobilisasi Sumberdaya, Konsultasi Manajemen, Membangun Jejaring dengan Pihak Ketiga, Perluasan dan Pengembangan Gerakan, Monitoring dan Evaluasi. Indikator keberhasilan penerapan delapan instrumen pengembangan keswadayaan ini adalah membaiknya kinerja organisasi (*organizational performance*), yang dapat dilihat dari tiga komponen penting yaitu kemandirian administrasi (*administrative autonomy*), kemandirian manajerial (*managerial autonomy*) dan kemandirian finansial (*financial autonomy*). Administrasi menunjuk pada kapasitas pemimpin dan anggota untuk menentukan tujuan organisasi dan usaha-usaha yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut.

Manajemen didefinisikan sebagai kapasitas untuk mengelola operasional lembaga sehari-hari. Aset menunjuk pada kapasitas lembaga dalam aspek finansial yang merupakan pendukung keberlanjutan aktivitas lembaga. Ketiga komponen tersebut saling berhubungan. Administrasi merupakan proses pengambilan keputusan atau penentuan tujuan. Manajemen adalah implementasi dari aktivitas pencapaian tujuan. Aset merupakan sumberdaya yang dimobilisasi untuk mencapai tujuan. Pada akhirnya, hasil dari pengembangan keswadayaan kelompok usaha simpan pinjam ini adalah terbangun kemandirian (*self-reliance*). Kemandirian adalah suatu keadaan di mana kelompok telah mencapai ketidaktergantungan dengan bantuan pihak lain untuk memberikan keamanan bagi kepentingan anggota-anggotanya. Implikasi dari kemandirian ini adalah kapasitas organisasi dan produktifitas kelompok digunakan untuk merancang strategi yang mampu memberikan kontribusi secara efektif dalam menciptakan kondisi kehidupan anggota yang lebih baik dan memelihara status kemandiriannya.

3. Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan merupakan salah satu proses yang perlu dilakukan untuk meningkatkan kemandirian masyarakat atau lembaga. Pemberdayaan adalah upaya membangun daya saing, dengan mendorong, memotivasi, dan membangkitkan aksi yang

dimiliki masyarakat serta berupaya untuk mengembangkannya (Kartasmita 1996) dalam pemberdayaan tersebut menurut (Suharto 2005) menunjuk pada kemampuan orang, khususnya kelompok rentan dan lemah sehingga mereka memiliki kekuatan atau kemampuan dalam : 1). Memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan (freedom, dalam arti bukan saja bebas mengemukakan pendapat, melainkan bebas dari kelaparan, bebas dari kebodohan, bebas dari kesakitan). 2). Menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang-barang dan jasa-jasa yang mereka perlukan. 3). Berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka.

Pemberdayaan dengan demikian merupakan sebuah proses dan tujuan. Sebagai proses, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan. Tiga cara pemberdayaan ekonomi menurut (Kartasmita 1996) antara lain :1). Menciptakan iklim yang memungkinkan lapisan masyarakat berkembang. 2). Memperbaiki potensi atau daya yang dimiliki. 3). Memberikan perlindungan bagi si lemah, mencegah persaingan tidak seimbang dan eksploitasi.

4. Penguatan Kapasitas

Penguatan adalah suatu proses upaya yang sistematis menjadikan lembaga suatu masyarakat menjadi lebih baik, dinamis, berdaya dan kuat dalam menghadapi berbagai pemenuhan kebutuhan dan tantangan atau hambatan yang dapat mempengaruhi eksistensinya. Penguatan kapasitas merupakan suatu proses peningkatan atau perubahan perilaku individu, organisasi dan sistem masyarakat dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan secara efektif dan efisien. Merujuk pendapat (Sumpeno 2002), penguatan kapasitas berarti terjadi perubahan perilaku untuk : 1). Meningkatkan kemampuan individu dalam pengetahuan, keterampilan dan sikap; 2). Meningkatkan kemampuan kelembagaan dalam organisasi dan manajemen, keuangan dan budaya; 3). Meningkatkan kemampuan masyarakat dalam kemandirian, keswadayaan dan mengantisipasi perubahan. Penguatan kelembagaan kelompok sangat diperlukan, karena dengan penguatan kapasitas masyarakat/usaha mikro kecil sebagai anggota bisa mengembangkan modal sosial, seperti yang dikemukakan oleh (Rubin & Rubin 1992) bahwa “pengembangan kapasitas adalah bagaimana menciptakan

kemampuan untuk menemukan kekurangan yang ada pada dirinya dan ada upaya untuk meningkatkan kekurangannya tersebut” . Hasil yang diharapkan dengan adanya penguatan kapasitas menurut (Sumpeno 2002) adalah :1). Penguatan individu, organisasi dan masyarakat. 2). Terbentuknya model pengembangan kapasitas dan program 3). Terbangunnya sinergisitas pelaku dan kelembagaan. Penguatan kapasitas lembaga simpan pinjam dapat dicapai melalui komponen kepercayaan, kerjasama dan kemitraan sehingga melalui pemberdayaan anggota dan lembaga akan dapat meningkatkan kemampuan atas pengetahuan, keterampilan dan sikap disamping dapat meningkatkan kemampuan lembaga dan kemampuan masyarakat miskin sebagai anggotanya.

III. METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini berbentuk studi kasus. Pendekatan ini digunakan dengan tujuan untuk menggali informasi sebanyak mungkin, mampu memahami dan mengidentifikasi gejala-gejala social ekonomi yang berkenaan dengan kapasitas kelembagaan kelompok dalam pengembangan ekonomi local. Kasus yang dipelajari dan diobservasi bervariasi seperti individu, kelembagaan, serta kelompok pemberdayaan ekonomi wilayah sosial secara periodik. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini disesuaikan dengan kebutuhan data di lapangan, yaitu data primer dan data sekunder. Teknik pengambilan data yang digunakan adalah sebagai berikut: 1) Wawancara Mendalam, 2) Pengamatan/observation : a) Pelaksanaan kegiatan pengembangan kapasitas kelembagaan , b) Keaktifan masyarakat dalam kegiatan PEW, 3) Teknik survei/kuesioner. Adapun metode analisis dalam penelitian ini menggunakan Logical Framework Analysis. Penggunaan alat analisis Logical Framework untuk mempermudah dalam menganalisis masalah, tujuan hingga penyusunan program.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Identifikasi potensi Pengembangan Ekonomi local Kota Yogyakarta

Pembangunan ekonomi Kota Yogyakarta merupakan rangkaian kegiatan pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan peranan sektor perdagangan, industri, koperasi dan jasa sehingga dapat terwujud kegiatan yang menggairahkan kehidupan ekonomi kota, memperluas lapangan kerja dan lapangan berusaha serta

meningkatkan pendapatan masyarakat secara lebih merata. Untuk mencapai tujuan tersebut dilaksanakan dengan kebijakan :

- a. Mengembangkan ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada usaha mikro kecil menengah dan koperasi (UMKMK)
- b. Mengembangkan lingkungan usaha dan iklim investasi
- c. Mendorong usaha yang berkelanjutan dan pemerataan ekonomi dengan lokomotif bidang pendidikan dan pariwisata.

Potensi usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Kota Yogyakarta tercatat sebanyak 18.234 unit usaha yang terdiri dari sektor industri sekitar 4.569 unit usaha dan sektor perdagangan dan jasa mencapai sekitar 13.126 unit usaha, dan koperasi 539 unit. Berbagai produk yang dihasilkan oleh usaha mikro kecil dan menengah merupakan produk unggulan yang telah mampu menembus pasar secara luas baik di tingkat lokal, regional, nasional maupun internasional sehingga pemerintah perlu memfasilitasi secara terus menerus agar keberadaan usaha mikro kecil dan menengah dapat semakin berkembang sehingga dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan perekonomian di Kota Yogyakarta. Berbagai permasalahan masih dihadapi oleh usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Oleh karena itu peran pemerintah sangat diperlukan untuk dapat memfasilitasi UMKM agar keberadaannya dapat dipertahankan dan dikembangkan sehingga memiliki daya tahan dan daya saing yang kuat dalam menghadapi era pasar bebas mendatang.

2. Program Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Kewilayahan (PEW)

Pada tahun 2006, Pemerintah Kota Yogyakarta melalui Dinas Perindagkop telah memberikan penguatan permodalan melalui kegiatan Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Kewilayahan (PEW) kepada para pengusaha mikro dan kecil yang tergabung dalam kelompok – kelompok di 5 kecamatan. Pada awalnya, direncanakan permodalan ini ditujukan kepada 14 kecamatan se-Kota Yogyakarta. Namun dengan adanya peristiwa gempa 26 Mei 2006, maka permodalan dialihkan kepada 5 kecamatan korban gempa terparah di Kota Yogyakarta, yakni Kecamatan Kotagede, Umbulharjo, Mergangsan, Mantrijeron, dan Gondokusuman. Tercatat sebanyak 28 kelompok usaha mikro kecil yang saat itu menerima guliran dana PEW, dengan total dana sebesar Rp.1.048.000.000,-. Tahun 2007, dana PEW kembali diluncurkan dengan sasaran 9 kecamatan yang belum menerima PEW di tahun 2006, yakni Kecamatan Kraton, Gondomanan, Gedongtengen, Danurejan, Jetis, Tegalgrejo,

Wirobrajan, Ngampilan dan Pakualaman. Penerima dana PEW 2007 adalah sebanyak 23 kelompok dengan total penerimaan sebesar Rp.912.000.000,-. Bentuk dana bergulir PEW 2006 dan 2007 adalah pinjaman lunak bersyarat, di mana kelompok penerima dana PEW memiliki kewajiban untuk mengembalikan dana tersebut ke Kas Daerah sesuai dengan ketentuan. Sampai dengan saat ini, total jumlah kelompok PEW dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2011 berjumlah 1.147 kelompok dengan dana Rp.13.035.000.000,-. Tujuan Program adalah Memberikan fasilitasi kepada usaha mikro kecil dan menengah dalam mengembangkan usahanya melalui penguatan permodalan dengan pola bergulir di internal kelompok. Sasaran kegiatan ini adalah komunitas usaha mikro kecil dan menengah yang tergabung dalam kelompok di 45 kelurahan se-Kota Yogyakarta. Hasil dan manfaat yang ingin dicapai adalah terpenuhinya kebutuhan permodalan bagi usaha mikro kecil dan menengah di 45 kelurahan se-Kota Yogyakarta sehingga usaha dan kegiatannya semakin berkembang. Jenis bantuan yang diberikan adalah bantuan hibah bersyarat yang akan dipergunakan untuk penguatan permodalan dan peningkatan sarana prasarana usaha bagi usaha mikro kecil menengah yang tergabung dalam kelompok-kelompok UMKM di 45 kelurahan se- Kota Yogyakarta.

3. Kelembagaan

Untuk mengelola bantuan pengembangan ekonomi wilayah berbasis kelurahan di Kota Yogyakarta diperlukan lembaga-lembaga pengelola sebagai berikut:

- Tim Koordinasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Berbasis Kewilayahan Kota Yogyakarta yang dibentuk dengan Keputusan Walikota Yogyakarta. Tim ini diketuai oleh Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Pertanian Kota Yogyakarta dengan anggota yang berasal dari unsur Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Pertanian Kota Yogyakarta, Bappeda Kota Yogyakarta, DPDPK

Kota Yogyakarta, Dinas Kesejahteraan Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta, Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta, Bank Pelaksana, Kecamatan dan Lembaga Swadaya Masyarakat

- Kelompok usaha mikro kecil dan menengah penerima bantuan.

4. Keswadayaan Kelompok PEW

Hasil yang diharapkan dari pengembangan keswadayaan kelompok PEW adalah terbangun kemandirian (self-reliance). Kemandirian adalah suatu keadaan di mana kelompok telah mencapai ketidaktergantungan dengan bantuan pihak lain untuk memberikan keamanan bagi kepentingan anggota. Keswadayaan kelompok PEW akan tercermin dari membaiknya kinerja tiga komponen organisasi yaitu kemandirian dalam administrasi, kemandirian dalam manajemen dan kemandirian dalam aset.

4.1. Kemandirian Administrasi

Administrasi menunjuk pada kapasitas pengurus dan anggota organisasi untuk menentukan tujuan organisasi dan usaha-usaha yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut. (Verhagen, 1996). Penentuan tujuan merupakan aspek penting keberlangsungan suatu organisasi, karena menjadi acuan dalam menentukan aktivitas-aktivitasnya. Tujuan organisasi akan tercermin dari anggaran dasar atau program-program yang disusun. Kemandirian dalam penentuan tujuan dan aktivitas untuk mencapai tujuan tersebut akan dimanifestasikan dari proses pengambilan keputusan yang partisipatif dan demokratis, sehingga merupakan aspirasi seluruh anggota. Program kerja kelompok PEW seharusnya disusun setiap satu tahun sekali. Program kerja yang akan dilaksanakan oleh kelompok PEW idealnya merupakan hasil musyawarah semua anggota kelompok. Dari hasil penelitian yang dilakukan, program-program yang disusun kelompok PEW di Kota Yogyakarta secara eksplisit dihasilkan dari musyawarah, karena diputuskan melalui rapat anggota kelompok. Namun demikian, secara kualitas, musyawarah yang dilakukan sebenarnya belum mencerminkan hasil musyawarah secara nyata. Karena Rencana-rencana Program yang dibuat pada dasarnya

sebagian besar merupakan hasil pemikiran dari Ketua Kelompokserta pengurus dan merupakan hasil pengarahan dari Fasilitator.

Berdasarkan hasil kajian sebagaimana dikemukakan, maka kemandirian dalam administrasi Kelompok PEW di Kota Yogyakarta secara umum dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Proses penentuan tujuan dan aktivitas untuk mencapai tujuan Kelompok PEW belum mencerminkan aspirasi seluruh anggota. Pengambilan keputusan belum mencerminkan partisipasi aktif dari para anggotanya. Perencanaan masih didominasi oleh pengurus (top down).
2. Program-program yang disusun secara substantive kurang mencakup upaya pemecahan masalah dan pengembangan pelayanan.

4.2. Kemandirian Manajemen

Kajian terhadap manajemen Kelompok PEW dilakukan terhadap pengorganisasian kegiatan dan , pelaksanaan pelayanan keuangan serta Pemantauan Kegiatan.

4.2.1. Pengorganisasian Kegiatan.

Salah satu prinsip dalam manajemen adalah prinsip tugas dibagi habis (Siswanto, 2005). Pada sebagian besar Kelompok PEW di Kota Yogyakarta , pembagian kerja telah dilakukan dengan membagi bidang kerja menjadi empat bidang, yaitu bidang organisasi, bidang permodalan dan kredit, bidang kesejahteraan sosial dan bagian pemantauan dengan tugas-tugas yang telah ditentukan. Sebagian besar kelompok PEW telah memiliki pembagian bidang pekerjaan dan rincian kegiatan, namun tidak ada penanggungjawab atau pihak yang harus melaksanakannya, atau dengan kata lain tidak ada kejelasan tentang “siapa melakukan apa”. Tidak ada pembagian tugas secara spesifik dan ketiadaan penanggungjawab terhadap bidang kerja ini menghambat Kelompok PEW dalam meningkatkan keterampilan kerja untuk meningkatkan pelayanan. Tugas pokok antar pengurus tidak terbagi dengan jelas dan tidak diatur secara tertulis

dalam anggaran dasar. Mereka melaksanakan tugas secara bersama-sama berdasarkan kesepakatan antar pengurus.

4.2.2. Pelaksanaan Pelayanan Keuangan.

Menurut *Verhagen* (1996), aspek penting dalam kemandirian manajemen adalah partisipasi anggota dalam memberikan kontribusi terhadap implementasi kegiatan (*contribute in the management and implementation of activity*) dan mobilisasi sumber-sumber finansial (*participate in the mobilization of financial resources*). Kontribusi anggota Kelompok PEW akan tercermin dari partisipasi anggota dalam pelaksanaan pelayanan penyaluran pinjaman/bantuan modal. Pelaksanaan penyaluran pelayanan pinjaman/bantuan modal yang diselenggarakan Kelompok PEW telah berjalan cukup baik. Program Pengembangan Ekonomi Berbasis Wilayah (PEW) merupakan program untuk memberikan fasilitas bantuan kepada usaha mikro kecil dan menengah dalam mengembangkan usahanya melalui penguatan permodalan dengan pola bergulir di internal kelompok. Dari sisi pelaksanaan penyaluran bantuan modal usaha prosedur yang digunakan juga sederhana, mudah dan tidak berbelit. Permasalahan Kelompok PEW sejak berdiri sampai saat ini belum terpecahkan, adalah kesenjangan antara jumlah anggota yang mengajukan pinjaman dengan jumlah anggota yang terealisasi pinjamannya.

4.2.3. Pemantauan.

Pemantauan terhadap kegiatan Kelompok PEW memungkinkan pengelolaan Kelompok PEW dilaksanakan secara transparan, sehingga kecil kemungkinan terjadinya penyimpangan dalam penggunaan keuangan. Dalam implementasinya, pemantauan kurang dapat berjalan sebagaimana mestinya. Faktor ketidaktahuan tentang pembukuan keuangan merupakan salah satu faktor yang menjadi hambatan pengurus untuk melaksanakan pemantauan. Berdasarkan hasil kajian terhadap pengorganisasian kegiatan, pelaksanaan pelayanan keuangan dan pengawasan sebagaimana

dikemukakan, aspek-aspek kemandirian dalam manajemen Kelompok PEW dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pengorganisasian kegiatan:
 - a. Pembagian kerja pengurus dalam Kelompok PEW belum dilakukan secara jelas.
 - b. Terdapat ketimpangan antara bidang tugas yang ditentukan dengan tugas dan tanggung jawab pengurus, sehingga tidak ada penanggung jawab setiap bidang tugas yang telah disusun dalam program kerjanya.
2. Pelaksanaan pelayanan:
 - a. Pelaksanaan pelayanan penyaluran bantuan modal usaha telah berjalan cukup baik, pembayaran angsuran dan bunga pinjaman berjalan lancar sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan.
 - b. Masalah yang telah berlangsung lama terjadi dan sulit diatasi oleh Kelompok PEW dalam pelaksanaan pemberian bantuan modal usaha adalah ketidakmampuan untuk memberikan pinjaman kepada semua anggota yang mengajukan pinjaman disebabkan oleh terbatasnya modal Kelompok PEW yang dihibahkan oleh Pemerintah.
3. Pemantauan:
 - a. Pemantauan dalam pengelolaan keuangan Kelompok PEW baik yang dilakukan oleh pengawas maupun anggota belum berjalan dengan baik.
 - b. Faktor yang menyebabkan kurang baiknya pemantauan adalah kurangnya pengetahuan pengawas dan anggota untuk memahami keadaan keuangan dalam bentuk pembukuan

4.3. Kemandirian Aset

Aset merupakan modal investasi yang pada gilirannya akan menghasilkan laju pemasukan di masa depan. Dalam kajian ini, yang dimaksud aset adalah aset nyata, yaitu aset finansial. Aset Kelompok PEW berbentuk uang,

tidak ada aset yang berbentuk barang atau surat-surat berharga. Hampir semua uang Kelompok PEW beredar dalam pinjaman anggota.

V. ANALISIS HASIL PENELITIAN

Program Pemberdayaan Masyarakat berbasis Ekonomi Kewilayahan (PEW) merupakan program yang bertujuan untuk memberikan fasilitasi kepada usaha mikro kecil dan menengah dalam mengembangkan usahanya melalui penguatan permodalan dengan pola bergulir di internal kelompok. Dengan pemberian bantuan modal secara bergulir, diharapkan kelompok-kelompok usaha akan dapat meningkatkan usahanya dan pada akhirnya bisa mengembangkan usaha secara swadaya/mandiri. Dalam program PEW keswadayaan Kelompok PEW menunjuk pada kemampuan pengurus dan anggota kelompok untuk menentukan pilihan terbaik bagi pemecahan masalah dan pengembangan pelayanan keuangan yang berkelanjutan dengan menggunakan sumber-sumber yang tersedia, sehingga memiliki kemampuan melaksanakan pelayanan simpanan, pinjaman dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi anggota-anggotanya. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan di Kota Yogyakarta dapat diketahui bahwa kemandirian (self-reliance) dari Kelompok-kelompok PEW yang menerima bantuan modal usaha belum dapat memiliki kemandirian penuh atau keswadayaan kelompok belum dapat tercapai. Sebagian kelompok-kelompok usaha yang ada di Kota Yogyakarta masih tergantung pada bantuan pihak lain untuk memberikan keamanan bagi kepentingan anggota-anggotanya. Sebagai akibatnya kapasitas organisasi dan produktifitas kelompok belum dapat menyusun rancangan strategi yang mampu memberikan kontribusi secara efektif dalam menciptakan kondisi kehidupan anggota yang lebih baik dan memelihara status kemandiriannya. Keswadayaan kelompok PEW di Kota Yogyakarta yang masih rendah tercermin dari tingkat kemandirian yang masih rendah, baik dalam hal kemandirian dalam administrasi, kemandirian dalam manajemen maupun kemandirian dalam aset. Pemantauan terhadap

kegiatan Kelompok PEW atau yang lebih dikenal dengan istilah Monitoring dan Evaluasi (Monev) yang seharusnya dilaksanakan secara transparan, dalam implementasinya, belum dapat berjalan sebagaimana mestinya Faktor ketidaktahuan tentang pembukuan keuangan merupakan salah satu faktor yang menjadi hambatan pengurus untuk melaksanakan pemantauan. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa tingkatkeswadayaan Kelompok PEW yang masih rendah, disebabkan oleh beberapa factor yang menghambat keswadayaan kelompok. Faktor-faktor tersebut adalah:

1. Kapasitas Pengurus Kelompok PEW, yang meliputi motivasi, pengetahuan dan keterampilan pengurus masih kurang. Hal ini dapat diketahui dari motivasi sebagian besar pengurus Kelompok PEW sehingga bersedia menjadi pengurus masih sebatas adanya dorongan untuk kepentingan pribadi belum terdorong motif untuk memajukan orang lain/masyarakat disekitarnya. Dalam hal pengetahuan dan keterampilan Pengurus, dapat diketahui bahwa Kemampuan Pengurus, baik dalam hal kemampuan untuk melakukan diagnosis terhadap permasalahan yang dihadapi, dalam hal menciptakan Strategi (kemampuan dalam memanfaatkan waktu dan kesempatan serta kemampuan untuk mengartikulasikan langkah-langkah proaktif yang mampu menjembatani masa kini dan masa yang akan datang.) maupun kemampuan untuk beradaptasi juga masih kurang

2. Partisipasi

Partisipasi anggota Kelompok PEW dalam perencanaan kegiatan masih rendah, sedangkan dalam pelaksanaan kegiatan termasuk dalam kategori cukup. Hal ini dapat dipahami oleh karena kapasitas masyarakat dalam manajemen masih kurang sehingga mereka kurang dapat menyusun suatu perencanaan konprehensif dan bersifat lintas sektoral.

3. Dukungan stakeholder.

Dari kondisi tentang kurangnya pendampingan dan pembinaan terhadap kemampuan dan ketrampilan para anggota Kelompok PEW oleh lembaga-

lembaga pemerintah dan non pemerintah (swasta) yang terkait dengan program PEW menunjukkan bahwa dalam hal sikap dan dukungan pelaksana kebijakan ternyata kepeduliannya masih kurang, terutama dalam upaya untuk meningkatkan kapasitas anggota maupun pengurus Kelompok PEW. Disamping factor-faktor yang menjadi penghambat peningkatan keswadayaan kelompok seperti tersebut diatas, berdasarkan hasil wawancara, pengamatan dan diskusi yang diadakan, dapat diketahui kendala-kendala lain yang menjadi penghambat keswadayaan Kelompok PEW, yaitu :

- 1) Informasi PEW masih sulit untuk diperoleh
- 2) Prosedur pengajuan PEW berbelit-belit
- 3) Proses pencairan PEW terlalu lama
- 4) Pembayaran angsuran yang tidak tepat waktu.
- 5) Perbedaan pendapat diantara anggota dalam mengatasi masalah keuangan yang dihadapi kelompok.
- 6) Format laporan kemajuan usaha terlalu rumit
- 7) Kurang Pendampingan dari Pemkot Yogyakarta

Oleh karena adanya factor-faktor penghambat keswadayaan kelompok PEW tersebut maka hal yang diperlukan untuk mengupayakan peningkatan keswadayaan yang cukup penting adalah layanan pendampingan yaitu pendampingan usaha, praktik usaha, pengarahan, pelatihan organisasi, penyuluhan manfaat PEW bagi UMK, informasi event/pameran, bantuan pemasaran, dan penambahan modal. Dengan pemberian layanan semacam ini bisa dimungkinkan usaha para responden akan berkembang lebih baik.

VI. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan di Kota Yogyakarta dapat disimpulkan bahwa Keswadayaan Kelompok-kelompok PEW yang menerima bantuan modal usaha belum sepenuhnya dapat tercapai. Sebagian besar kelompok-kelompok usaha yang ada masih tergantung pada bantuan pihak lain untuk memberikan keamanan bagi kepentingan anggota-anggotanya. Keswadayaan kelompok

PEW yang masih rendah tercermin dari tingkat kemandirian yang masih rendah, baik dalam hal kemandirian dalam administrasi, kemandirian dalam manajemen maupun kemandirian dalam aset. Tingkat keswadayaan Kelompok PEW yang masih rendah, disebabkan oleh beberapa factor, yaitu

1. Kapasitas Pengurus Kelompok PEW, yang meliputi motivasi, pengetahuan dan keterampilan pengurus masih kurang.
2. Partisipasi anggota Kelompok PEW dalam perencanaan kegiatan masih rendah, sedangkan dalam pelaksanaan kegiatan termasuk dalam kategori cukup.
3. Dukungan stakeholder atau kepedulian lembaga-lembaga yang terkait (pemerintah dan swasta) masih kurang, terutama dalam upaya untuk meningkatkan kapasitas anggota maupun pengurus Kelompok PEW

2. Saran

Pengembangan keswadayaan kelompok penerima bantuan modal Program PEW di Kota Yogyakarta perlu diupayakan peningkatannya, melalui berbagai langkah-langkah kebijakan yaitu:

a. Peningkatan Kapasitas Pengurus Kelompok PEW.

Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan penyuluhan dan pelatihan kepada Pengurus Kelompok PEW secara rutin. Adapun jenis pelatihan yang diadakan disesuaikan dengan kebutuhan calon peserta.

b. Peningkatan Partisipasi Anggota dan Pengurus Kelompok

Partisipasi anggota Kelompok PEW perlu ditingkatkan secara terus menerus dengan melibatkan anggota Kelompok PEW dalam penyusunan perencanaan kegiatan maupun dalam pelaksanaan program.

c. Upaya Peningkatan Dukungan stakeholder.

Pemerintah Daerah dari tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Kelurahan perlu lebih memperhatikan upaya peningkatan kapasitas masyarakat penerima Program PEW, dengan memberi kesempatan dan

peluang kepada masyarakat untk mengembangkan usahanya dan menjalin kemitraan usaha dengan pihak-pihak terkait.

- d. Peningkatan fungsi Pendampingan, Monitoring dan Evaluasi, melalui pemilihan petugas yang kompeten, jujur dan bertanggungjawab, berkinerja tinggi serta memiliki kepedulian social yang tinggi dan menguasai strategi pemberdayaan masyarakat yang efektif, konsisten dan berkesinambungan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Isbandi Rukminto. 2001, "Pemberdayaan, Pengembangan Masyarakat, dan Intervensi Komunitas: Pengantar pada Pemikiran Pendekatan Praktis", Jakarta, Lembaga Penerbit FE-UI.
- Cook, James B,1994, "Community Development Theory",Community Development Publication MP568, Dept.of Community Development, University Of MissouriColumbia.
- Dahana, O.P.and O.P Bhatnagar, 1980, Education and Communication for Development, New Dehli: Oxford & IBH Publishing CO.
- Djuli Sugiarto,2006, "Penguatan kapasitas Lembaga Simpan Pinjam Rukun Lestari untuk pemberdayaan masyarakat miskin" Tesis, Sekolah paskasarjana, IPB, Bogor
- Gunardi, Agung, Sarwititi.S. dan Ninuk Purwaningsih, 2004, Pengantar Pengembangan Masyarakat. MPPM, IPB Bogor.
- Haeruman dan Eriyatno, 2001, "Kemitraan Dalam Pengembangan Ekonomi Lokal", Jakarta, Yayasan Mitra Pembangunan Desa-Kota dan BIC Indonesia.
- Hikmat,Harry,2001, Strategi Pemberdayaan Masyarakat, Humaniora Utama Perss, Bandung,
- Ife, Jim, 2002, "Community Development : Community Based Alternatives in an Age of Globalizationd", Australia, Pearson Education.
- Israel, Arturo, 1992, "Pengembangan Kelembagaan. Jakarta", LP3S.

- Kartasmita, Ginanjar, 1996, "Pembangunan Untuk Rakyat Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan", Jakarta, Pustaka Cidesindo.
- Nasdian & Utomo, 2004. ." Pengembangan Kelembagaan dan Modal Sosial", jurusan Ilmu-ilmu Sosial Ekonomi, Fakultas Pertanian, Institut Pertanian Bogor. Bogor.
- Mardikanto, Totok dan Poerwoko soebianto, "Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik", Penerbit Alfa Beta, Bandung.
- Mikkelsen, Britha, 2003, "Metode Penelitian Partisipatoris Dan Upaya-upaya Pemberdayaan", Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Mulyono, Mauzid, 1993, "Penerapan Produktivitas dalam Organisasi", Bumi Aksara Jakarta.
- Purwadarminta, WJS, 1992, "Kamus Umum Bahasa Indonesia", Balai Pustaka, Jakarta.
- Rubin, Herbert dan Irene S. Rubin, 1992, "Community Organizing and Development". New York, Mac Milian Publishing Company.
- Subejo dan Supriyanto, 2004, "Metodologi Pendekatan Pemberdayaan Masyarakat", short paper pada Kuliah Intensif Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan
- Suharto, Edy, 2005, "Membangun Masyarakat, Memberdayakan Rakyat", Bandung, Aditama.
- Suharto, Edy, 2005, "Analisis Kebijakan Publik", Bandung, Alfabeta.
- Sumarjo dan Saharudin, 2004, "Metode-metode Partisipatif dalam Pengembangan Masyarakat, Bogor, Jurusan Ilmu-ilmu Sosial Ekonomi, Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor
- Sumpeno, 2002, "Capacity Building, Persiapan dan Perencanaan", Jakarta, Catholic Relief Services.
- Sumodiningrat, Gunawan. 2003, "Pembangunan Daerah dan Pemberdayaan Masyarakat". PT Bina Rena Parawira. Jakarta.
- Sutarso, 2005, "Praktek Pekerjaan Sosial dalam Pembangunan Masyarakat", Jakarta, BALATBANGSOS DEPSOS RI.
- Syahyuti, 2003, Bedah Konsep Kelembagaan: Strategi Pengembangan dan Penerapannya Dalam Penelitian pertanian. Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian', Badan Litbang Pertanian Bogor.

Syaukat, Yusman dan Sutara Hendrakusumaatmaja,2004, Pengembangan Ekonomi Lokal Berbasis Lokal, MPPM, IPB Bogor, 2004.

Thoha, Miftah.2003 Pembinaan Organisasi, Proses Diagnosa dan Intervensi, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Verhagen, K. 1996. Pengembangan Keswadayaan. Pengalaman LSM di Tiga Negara.PT Penebar Swadaya, Jakarta

[www. Disperindagkoptan.go.id](http://www.Disperindagkoptan.go.id)